



THAQAFIYYAT: Jurnal Bahasa, Peradaban, dan Informasi Islam

ISSN (Print): 1411-5727, ISSN (Online): 2550-0937

<http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyat/index>

Vol 24, No. 1 (2025)

Research Article

Peran Sultan Abdul Hamid II dalam Mempertahankan Tanah Palestina dari Yahudi Tahun 1876–1909

Ana Tutik Alawiyah

Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Jangkung, Pati, Indonesia

E-mail: anatutik42@gmail.com

Muhammad Yusrul Hana

Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Jangkung, Pati, Indonesia

E-mail: yusrulhana33@gmail.com

Submitted: Sept 9, 2025; Reviewed: Sept 19, 2025; Accepted: Sept 22, 2025

Abstrak: Penelitian ini membahas peran Sultan Abdul Hamid II dalam mempertahankan Palestina dari upaya gerakan Zionis Yahudi pada periode 1876–1909. Fokus penelitian diarahkan pada strategi politik, diplomatik, dan ideologis yang diterapkan Sultan Abdul Hamid II untuk menolak tawaran tokoh Zionis Theodor Herzl yang berupaya membeli tanah Palestina sebagai wilayah pemukiman Yahudi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, mengacu pada sumber-sumber primer seperti memoar Sultan Abdul Hamid II dan dokumen sejarah Kesultanan Utsmaniyah, serta sumber sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan skripsi terdahulu. Analisis data dilakukan melalui tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi, dengan kerangka teori geopolitik yang memandang keterkaitan antara kondisi geografis dan kebijakan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sultan Abdul Hamid II menolak segala bentuk penjualan tanah Palestina kepada pihak asing, menerapkan kebijakan Pan-Islamisme untuk memperkuat solidaritas umat Islam, serta memperketat pengawasan administratif dan pembatasan imigrasi Yahudi. Keputusan ini tidak hanya mempertahankan integritas wilayah Kesultanan Utsmaniyah, tetapi juga memperkuat kesadaran politik umat Islam terhadap pentingnya Palestina sebagai tanah suci. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman historis

mengenai kebijakan pertahanan wilayah dalam konteks kolonialisme dan gerakan nasionalisme religius pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20.

Kata Kunci: Sultan Abdul Hamid II; Palestina; Zionisme; Pan-Islamisme; Kesultanan Utsmaniyah

Abstract: This study examines the role of Sultan Abdul Hamid II in defending Palestine from the efforts of the Jewish Zionist movement in the period 1876–1909. The focus of the study is directed at the political, diplomatic, and ideological strategies implemented by Sultan Abdul Hamid II to reject the offer of the Zionist figure Theodor Herzl who attempted to purchase Palestinian land for Jewish settlement. This study uses a qualitative method with a literature study approach, referring to primary sources such as the memoirs of Sultan Abdul Hamid II and historical documents of the Ottoman Empire, as well as secondary sources in the form of books, scientific articles, and previous theses. Data analysis was carried out through the stages of heuristics, verification, interpretation, and historiography, with a geopolitical theoretical framework that views the relationship between geographical conditions and political policies. The results of the study show that Sultan Abdul Hamid II rejected all forms of sales of Palestinian land to foreign parties, implemented a Pan-Islamic policy to strengthen Muslim solidarity, and tightened administrative supervision and restrictions on Jewish immigration. This decision not only maintained the territorial integrity of the Ottoman Empire, but also strengthened the political awareness of Muslims regarding the importance of Palestine as a holy land. This research contributes to the historical understanding of territorial defense policy in the context of colonialism and religious nationalist movements in the late 19th and early 20th centuries.

Keywords: Sultan Abdul Hamid II; Palestine; Zionism; Pan-Islamism; Ottoman Empire

PENDAHULUAN

Sultan Abdul Hamid II merupakan pemimpin Kesultanan Utsmaniyah yang memerintah selama 33 tahun (1876–1909) di tengah situasi politik internasional yang kompleks.¹ Pemerintahannya ditandai dengan kebijakan tegas dalam menolak tekanan gerakan Zionis untuk membangun pemukiman Yahudi di Palestina, terutama melalui tawaran Theodor Herzl yang menjanjikan bantuan finansial besar sebagai imbalan atas wilayah tersebut.² Penolakan ini bukan sekadar keputusan politik, tetapi mencerminkan komitmen religius dan visi geopolitik Sultan Abdul Hamid II dalam mempertahankan tanah suci umat Islam.³

Pada akhir abad ke-19, Kesultanan Utsmaniyah menghadapi kemunduran signifikan, baik dari sisi ekonomi maupun militer.⁴ Di tengah krisis ini, Sultan Abdul Hamid II mengusung kebijakan *Pan-Islamisme* untuk menyatukan umat Islam di bawah kepemimpinan Khilafah Utsmaniyah, sebagai strategi melawan dominasi kolonial Barat.⁵

¹ Masturi Ilham dan Mujiburrahman, *Memoar Sultan Abdul Hamid II: Benteng Terakhir Khalifah Utsmani dalam Menghadapi Yahudi Fremasson dan Sekuler Liberal* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 45.

² I'in Sayyi Mawarti, "Gagasan Pan-Islamisme dan Upaya Sultan Abdul Hamid II Mempertahankan Kekhilafahan Turki Utsmani Tahun 1876–1909" (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 67.

³ Nik Zaitun Yusni Ali dan Mohd Roslan Mohd Nor, "Ketokohan dan Sumbangan Sultan Abdul Hamid II Sebagai Khalifah Terakhir Dawlah Uthmaniyyah Berlandaskan Prinsip al-Quran dan al-Sunnah," *Journal of Ma'alim al-Quran wa al-Sunnah* 14, no. 1 (2018): 93.

⁴ Rizka Kusuma Rahmawati, "Studi Historis Kebijakan Luar Negeri Sultan Abdul Hamid II di Daulah 'Utsmaniyah (1876–1909 M)," *JUSPI* 1, no. 1 (2017): 14.

⁵ Afifah Alawiyah, "Strategi Kebijakan Politik Pan-Islamisme Turki Utsmaniyah Pada Masa Sultan Abdul Hamid II (1876–1909 M)" (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 88.

Tahun 1896 menjadi titik krusial ketika Herzl mengajukan proposal resmi untuk pemukiman Yahudi di Palestina, yang kemudian ditolak dengan pernyataan tegas bahwa Palestina adalah amanah umat Islam dan tidak dapat diperjualbelikan.⁶

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap strategi konkret Sultan Abdul Hamid II, mulai dari kebijakan diplomatik, penguatan kontrol administratif di Palestina, hingga pembatasan migrasi Yahudi, yang selama ini belum banyak dibahas secara mendalam pada kajian sebelumnya.⁷ Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Murat Gökmen bahwa masa Sultan Abdul Hamid berusaha sekutu tenaga untuk mempertahankan keberadaan dan status mereka di Palestina melawan Zionis Inggris dan Yahudi.⁸ Begitu juga dengan kajian David Kushner, bahwa pada masa Sultan Abdul Hamid II, kaum Arab Palestina berjuang sekutu tenaga dalam mempertahankan tanah air mereka dari bangsa Zionis Inggris dan Yahudi.⁹ Keterbaruan Kajian yang dilakukan ini tidak hanya menganalisis peran Sultan dalam konteks geopolitik, tetapi juga dengan mempertimbangkan pengaruh faktor geografis dan politik internasional terhadap kebijakan pertahanan wilayahnya.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan biografi Sultan Abdul Hamid II; (2) menguraikan strategi dan tindakan beliau dalam menolak pemukiman Yahudi di Palestina; dan (3) menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap dinamika politik dan sosial di Palestina. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami hubungan antara kekuasaan politik Islam, kolonialisme, dan gerakan nasionalisme religius pada masa akhir Kesultanan Utsmaniyah.¹¹

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*).¹² Fokus utama penelitian adalah menganalisis secara mendalam peran Sultan Abdul Hamid II dalam mempertahankan Palestina dari upaya Yahudi pada periode 1876–1909. Metode kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengungkap peristiwa sejarah, gagasan politik, serta strategi yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid II melalui interpretasi data tertulis.

Dalam penelitian sejarah, terdapat empat tahapan utama yang ditempuh, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.¹³ Tahap heuristik dilakukan dengan

⁶ I'in Sayyi Mawarti, "Gagasan Pan-Islamisme dan Upaya Sultan Abdul Hamid II Mempertahankan Kekhilafahan Turki Utsmani Tahun 1876–1909," 73.

⁷ Masturi Ilham dan Mujiburrahman, *Memoar Sultan Abdul Hamid II: Benteng Terakhir Khalifah Utsmani dalam Menghadapi Yahudi Fremasson dan Sekuler Liberal*, 112.

⁸ Murat Gökmen, "Attitudes of Palestinian Arabs Towards Jewish Zionism During and After the Reign of Sultan Abdul Hamid II," *Journal of Islamicjerusalem Studies* 23, no. 2 (2023): 201.

⁹ David Kushner, "The Ottoman Governors of Palestine, 1864–1914," *Middle Eastern Studies* 23, no. 3 (2006): 279.

¹⁰ Rizka Kusuma Rahmawati, "Studi Historis Kebijakan Luar Negeri Sultan Abdul Hamid II di Daulah 'Utsmaniyah (1876–1909 M)," 21.

¹¹ Nik Zaitun Yusni Ali dan Mohd Roslan Mohd Nor, "Ketokohan dan Sumbangan Sultan Abdul Hamid II Sebagai Khalifah Terakhir Dawlah Uthmaniyyah Berlandaskan Prinsip al-Quran dan al-Sunnah," 96.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 9.

¹³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 2018), 98.

mengumpulkan sumber-sumber sekunder yang relevan, meliputi buku sejarah, artikel ilmiah, jurnal, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan kebijakan Sultan Abdul Hamid II terhadap Palestina seperti jurnal penelitian internasional Murat Gökmen, David Kushner yang mengulas peran Sultan Hamid II dalam memerangi bangsa Zionis dan buku memoar Sultan Abdul Hamid II.

Tahap verifikasi dilakukan dengan menguji keaslian, kredibilitas, serta validitas sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Hal ini penting agar penelitian terbebas dari distorsi sejarah. Sumber-sumber yang digunakan dibandingkan secara kritis, baik dari perspektif sejarawan Islam maupun orientalis, untuk memperoleh keseimbangan data.

Tahap interpretasi merupakan proses menafsirkan data sejarah yang telah diverifikasi. Pada tahap ini, peneliti menekankan analisis terhadap strategi dan kebijakan Sultan Abdul Hamid II dengan menggunakan teori geopolitik sebagai pisau analisis. Geopolitik membantu menjelaskan bagaimana kondisi geografis dan posisi strategis Palestina memengaruhi kebijakan Sultan Abdul Hamid II serta pandangannya mengenai ancaman Zionisme.¹⁴

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penyusunan hasil penelitian dalam bentuk tulisan yang sistematis, deskriptif, dan analitis. Melalui tahapan ini, peran Sultan Abdul Hamid II dalam mempertahankan Palestina dapat dijelaskan secara komprehensif, baik dari segi biografi, strategi politik, maupun dampak keputusan yang diambilnya terhadap dinamika politik dan sosial dunia Islam.

Kerangka teori yang digunakan adalah teori geopolitik, yang mengkaji hubungan antara kondisi geografis suatu wilayah dengan kebijakan politiknya.¹⁵ Dalam konteks ini, kebijakan Sultan Abdul Hamid II mempertahankan Palestina dilihat sebagai strategi politik berbasis pertimbangan geografis dan religius untuk menjaga integritas wilayah dan identitas umat Islam.

HASIL

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sultan Abdul Hamid II merupakan pemimpin yang konsisten dalam mempertahankan tanah Palestina dari upaya Yahudi untuk menetap pada periode 1876–1909. Dari aspek biografinya, Sultan Abdul Hamid II tampil sebagai sosok cerdas, tegas, dan religius yang memandang Palestina bukan sekadar wilayah politik, tetapi juga tanah suci umat Islam yang harus dilindungi. Pandangan religius dan komitmen geopolitiknya inilah yang membentuk dasar kebijakan kerasnya terhadap tawaran Zionis, meskipun Kesultanan Utsmaniyah tengah berada dalam kondisi ekonomi dan politik yang sulit.

Penelitian ini juga menemukan bahwa strategi utama Sultan Abdul Hamid II dalam menghadapi upaya Yahudi adalah penolakan diplomatis terhadap tawaran Theodor Herzl yang menjanjikan pelunasan utang Kesultanan dan bantuan finansial besar. Sultan menolak dengan alasan bahwa tanah Palestina bukanlah milik pribadi, melainkan milik

¹⁴ Rizka Kusuma Rahmawati, “Studi Historis Kebijakan Luar Negeri Sultan Abdul Hamid II di Daulah ‘Utsmaniyah (1876–1909 M).” 86.

¹⁵ Saul Bernard Cohen, *Geopolitics: The Geography of International Relations* (Lanham: Rowman & Littlefield, 2015), 22.

seluruh umat Islam, sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Penolakan ini disertai dengan langkah administratif berupa pengawasan ketat terhadap kepemilikan tanah di Palestina dan pembatasan imigrasi Yahudi ke wilayah tersebut. Dengan kebijakan ini, Sultan berhasil memperlambat proses kolonialisasi Yahudi di Palestina.

Selain strategi penolakan langsung, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Sultan Abdul Hamid II menggunakan Pan-Islamisme sebagai instrumen politik untuk memperkuat kesadaran umat Islam. Ia membangun solidaritas global melalui jaringan ulama, media, dan diplomasi internasional guna meneguhkan posisi Kekhalifahan Utsmaniyah sebagai benteng terakhir umat Islam. Dengan cara ini, Sultan tidak hanya menjaga integritas Palestina, tetapi juga membangkitkan rasa persatuan di kalangan Muslim di berbagai belahan dunia, termasuk Asia, Afrika, dan Asia Tenggara.

Dampak politik dari keputusan Sultan Abdul Hamid II sangat signifikan. Penolakannya terhadap tawaran Zionis mempertegas posisi Utsmaniyah sebagai pelindung tanah suci dan memperlambat ambisi Zionisme di Palestina. Keputusan ini meningkatkan legitimasi Sultan di mata umat Islam, walaupun sekaligus menambah tekanan dari kekuatan Barat yang mulai condong mendukung gerakan Zionis. Dari sisi sosial, kebijakan Sultan memberi rasa aman kepada masyarakat Palestina dan memperkuat identitas kolektif umat Islam sebagai penjaga Masjid al-Aqsha. Solidaritas ini menjadi modal penting bagi kesadaran politik umat Islam terhadap ancaman kolonialisme dan Zionisme.

Dalam jangka panjang, hasil penelitian memperlihatkan bahwa keputusan Sultan Abdul Hamid II mampu menunda proses kolonialisasi Yahudi dan menanamkan kesadaran kuat di dunia Islam tentang pentingnya mempertahankan Palestina. Meskipun setelah kejatuhannya Kesultanan Utsmaniyah dan runtuhan sistem Khilafah membuat pengaruh kebijakan ini melemah, warisan sikap tegas Sultan tetap menjadi inspirasi perjuangan umat Islam hingga kini. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa peran Sultan Abdul Hamid II tidak hanya berpengaruh pada masa pemerintahannya, tetapi juga meninggalkan jejak sejarah yang penting dalam dinamika politik dan sosial Palestina serta dunia Islam.

PEMBAHASAN

A. Biografi Sultan Abdul Hamid II

Sultan Abdul Hamid II, yang memerintah dari tahun 1876 hingga 1909, adalah sultan terakhir dari Kekhalifahan Utsmaniyah yang dikenal karena upayanya mempertahankan kekhalifahan di tengah tantangan besar dari kekuatan luar dan internal. Ia lahir pada 21 September 1842 dan merupakan putra dari Sultan Abdul Mejid I. Abdul Hamid II dikenal sebagai pemimpin yang berusaha untuk mengimplementasikan reformasi modern di dalam kekhalifahan, meskipun ia juga menghadapi banyak kritik dan penentangan, terutama dari kalangan sekuler dan liberal yang ingin mengubah struktur pemerintahan yang ada.¹⁶

¹⁶ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 59-61.

Sultan Abdul Hamid II berusaha untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan luar negeri dan dalam pemerintahan, dengan fokus pada pan-Islamisme sebagai strategi untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Ia percaya bahwa dengan memperkuat solidaritas umat Islam, ia dapat melawan pengaruh Barat yang semakin mendominasi. Dalam konteks ini, Abdul Hamid II juga berusaha untuk memperkuat posisi kekhalifahan di mata dunia, meskipun pada akhirnya ia harus menghadapi berbagai tantangan yang mengarah pada keruntuhan kekhalifahan itu sendiri.

Di bawah kepemimpinannya, Abdul Hamid II juga berhadapan dengan berbagai masalah internal, termasuk gerakan nasionalis di berbagai wilayah kekhalifahan. Meskipun ia berusaha untuk melakukan reformasi, banyak yang menganggap bahwa pendekatannya yang otoriter dan pengekangan terhadap kebebasan berpendapat justru memperburuk situasi. Akhirnya, pada tahun 1909, ia digulingkan oleh gerakan Young Turks yang menginginkan reformasi lebih lanjut dan modernisasi yang lebih radikal dalam.¹⁷

Sultan Abdul Hamid II meninggal pada 10 Februari 1918, setelah masa pemerintahan yang penuh dengan tantangan dan kontroversi. Warisannya tetap menjadi topik perdebatan di kalangan sejarawan, dengan beberapa memandangnya sebagai pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan Islam dan kekhalifahan, sementara yang lain melihatnya sebagai simbol dari kekuasaan yang terpuruk dan gagal beradaptasi dengan perubahan zaman.¹⁸

Berkenaan dengan latar belakang silsilah keluarga Sultan Abdul Hamid II, sang sultan tersebut lahir pada 21 September 1842 di Istana Topkapi, Istanbul, sebagai putra dari Sultan Abdul Mejid I dan permaisurinya, Sultan Mahbube. Ia berasal dari keluarga kerajaan Utsmaniyah yang memiliki sejarah panjang dan kompleks dalam memerintah wilayah yang luas, termasuk Asia, Eropa, dan Afrika. Keluarga Utsmaniyah dikenal dengan tradisi monarki yang kuat, di mana kekuasaan dan legitimasi sering kali diwariskan melalui garis keturunan laki-laki. Abdul Hamid II adalah anak keempat dari enam bersaudara, dan sejak kecil, ia dididik dalam lingkungan yang ketat dan formal, di mana pendidikan politik, militer, dan agama menjadi fokus utama.¹⁹

Sebagai seorang sultan, Abdul Hamid II mewarisi tantangan besar dari pendahulunya, termasuk masalah internal seperti gerakan nasionalis di berbagai provinsi dan tekanan dari kekuatan asing yang ingin memanfaatkan kelemahan kekhalifahan. Keluarganya, yang telah memerintah selama lebih dari enam abad, menghadapi ancaman eksistensial yang semakin meningkat, dan Abdul Hamid II berusaha untuk mempertahankan kekuasaan dan integritas wilayah kekhalifahan dengan berbagai cara, termasuk melalui kebijakan pan-Islamisme yang ia anggap sebagai solusi untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia.²⁰

¹⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 193.

¹⁸ Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 241.

¹⁹ Masturi Ilham dan Mujiburrahman, *Memoar Sultan Abdul Hamid II: Benteng Terakhir Khalifah Utsmani dalam Menghadapi Yahudi Fremasson dan Sekuler Liberal*, 86.

²⁰ I'in Sayyi Mawarti, "Gagasan Pan-Islamisme dan Upaya Sultan Abdul Hamid II Mempertahankan Kekhilafahan Turki Utsmani Tahun 1876–1909." 30.

Keluarga Utsmaniyah juga dikenal dengan praktik politik yang sering kali melibatkan intrik dan persaingan di antara anggota keluarga, yang kadang-kadang mengarah pada konflik dan pembunuhan. Dalam konteks ini, Abdul Hamid II harus navigasi dengan hati-hati untuk mempertahankan posisinya sebagai sultan dan menghindari nasib tragis yang menimpa beberapa pendahulunya.²¹

Terkait bidang pendidikan dan perjalanan karirnya, didapati data bahwa Sultan Abdul Hamid II yang lahir pada 21 September 1842 di Istanbul, Kesultanan Utsmaniyah, sebagai putra Sultan Abdul Majid I masa kecilnya diwarnai dengan berbagai pendidikan yang diberikan secara khusus untuk mempersiapkan perannya sebagai bagian dari keluarga kerajaan. Pendidikan Abdul Hamid mencakup ilmu agama, politik, dan strategi militer, yang diberikan oleh ulama dan cendekiawan terbaik pada masanya. Selain itu, ia juga mempelajari bahasa asing, termasuk Arab, Persia, dan Prancis, yang memungkinkan dirinya berkomunikasi dengan berbagai kalangan internasional. Pendidikan ini membentuk dasar pemahamannya tentang geopolitik dan tantangan yang dihadapi Kesultanan Utsmaniyah di tengah tekanan Barat.²²

Selain pendidikan formal, Abdul Hamid II juga diperkenalkan pada kehidupan istana dan pemerintahan sejak usia muda. Ia sering mendampingi ayahnya dalam berbagai acara resmi, yang memberikan wawasan langsung tentang administrasi negara. Setelah kematian ayahnya, ia tetap aktif dalam pemerintahan di bawah pamannya, Sultan Abdul Aziz. Dalam periode ini, ia semakin memahami peran strategis yang harus diambil oleh Kesultanan Utsmaniyah dalam menghadapi imperialisme Eropa.²³

Sultan Abdul Hamid II memerintah Kesultanan Utsmaniyah pada periode 1876 hingga 1909, di tengah situasi politik dan sosial yang penuh dengan tekanan baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu langkah awalnya adalah mengesahkan Kanun-i Esasi (Konstitusi Utsmaniyah) pada tahun 1876, sebagai respons terhadap tuntutan reformasi dari kelompok Tanzimat. Namun, dua tahun kemudian, konstitusi tersebut dibekukan dengan alasan stabilitas negara, yang menandai awal dari era otoritarianisme dalam pemerintahannya.²⁴

Pada masa pemerintahannya, Sultan Abdul Hamid II menghadapi berbagai tantangan, termasuk gerakan separatis di Balkan, tekanan dari kekuatan Eropa, dan ancaman dari gerakan Zionisme internasional. Untuk melawan ancaman ini, ia menggunakan pendekatan diplomasi dan kebijakan Pan-Islamisme sebagai alat politik. Abdul Hamid II berusaha memperkuat solidaritas umat Islam di bawah panji Khilafah Utsmaniyah dengan menonjolkan perannya sebagai Khalifah Islam, yang bertujuan untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia melawan kolonialisme Barat.²⁵

Theodore Herzl, seorang jurnalis dan tokoh utama dalam gerakan Zionisme, mencanangkan ide pembentukan negara Yahudi di Palestina pada akhir abad ke-19. Herzl melihat Palestina sebagai lokasi strategis dan simbolis untuk mewujudkan impian

²¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 159.

²² Masturi Ilham dan Mujiburrahman, *Memoar Sultan Abdul Hamid II: Benteng Terakhir Khalifah Utsmani dalam Menghadapi Yahudi Fremasson dan Sekuler Liberal*, 45-47.

²³ Masturi Ilham dan Mujiburrahman, 48.

²⁴ Masturi Ilham dan Mujiburrahman, 95

²⁵ Ash-Shallabi, *Bangkit dan Runtuhan Khilafah Utsmaniyah*, 193.

nasionalisme Yahudi. Dalam buku harianya, Herzl mencatat berbagai upaya untuk mendekati pemimpin dunia, termasuk Sultan Abdul Hamid II, yang saat itu memerintah Kesultanan Utsmaniyah. Ia menawarkan sejumlah besar bantuan keuangan kepada Kesultanan yang sedang menghadapi krisis ekonomi, termasuk rencana pelunasan utang negara.²⁶

Pada tahun 1896, Herzl mengajukan tawaran konkret kepada Sultan Abdul Hamid II melalui perwakilan diplomatiknya. Tawaran tersebut meliputi pelunasan utang luar negeri Kesultanan Utsmaniyah., investasi ekonomi yang signifikan di wilayah Kesultanan dan dukungan politik dan diplomatik dari komunitas Yahudi internasional.²⁷ Herzl percaya bahwa pendekatan finansial ini akan menarik perhatian Sultan, mengingat kondisi ekonomi Kesultanan yang saat itu sedang dalam situasi kritis. Selain itu, Sultan Abdul Hamid II dengan tegas menolak tawaran Herzl. Keputusan ini didasarkan pada beberapa faktor seperti indikasi nilai Agama dan Moral di mana hal ini karena Sultan Abdul Hamid II memandang Palestina sebagai tanah suci yang tidak boleh diserahkan kepada pihak lain. Dalam memoarnya, ia menulis, "Palestina bukan milik saya, melainkan milik umat Islam. Saya tidak akan mengorbankan tanah suci ini untuk emas atau kekuasaan".²⁸ Kesadaran Geopolitik juga menjadi dasar karena Sultan memahami bahwa penyerahan Palestina kepada Yahudi dapat memicu ketegangan politik dan sosial yang luas, baik di wilayah Kesultanan maupun dunia Islam secara keseluruhan. Adanya komitmen terhadap Keutuhan Wilayah menjadikan Sultan Abdul Hamid II memandang Palestina sebagai bagian tak terpisahkan dari Kesultanan Utsmaniyah, sehingga kehilangan wilayah tersebut akan melemahkan legitimasi dan kedaulatan negara.²⁹

Adapun di akhir hayatnya, Sultan Abdul Hamid II menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan setelah digulingkan dari tahtanya oleh Komite Persatuan dan Kemajuan (Young Turks) pada tahun 1909. Ia dipindahkan ke Istana Beylerbeyi di Istanbul, di mana ia hidup di bawah pengawasan ketat. Selama masa pengasingannya, Abdul Hamid II tetap menjadi simbol penting dalam sejarah umat Islam, meskipun pengaruh politiknya telah hilang sepenuhnya.³⁰

Sultan Abdul Hamid II wafat pada 10 Februari 1918, di usia 76 tahun. Kematian Abdul Hamid terjadi di tengah-tengah Perang Dunia I, saat Kesultanan Utsmaniyah sedang menghadapi keruntuhan besar akibat tekanan dari kekuatan-kekuatan dunia. Meskipun telah meninggalkan tahta hampir satu dekade sebelumnya, banyak yang mengingatnya sebagai pemimpin yang berjuang keras mempertahankan integritas wilayah Utsmaniyah dan memperjuangkan hak-hak umat Islam.³¹

²⁶ Masturi Ilham dan Mujiburrahman, *Memoar Sultan Abdul Hamid II: Benteng Terakhir Khalifah Utsmani dalam Menghadapi Yahudi Fremasson dan Sekuler Liberal*, 107.

²⁷ Masturi Ilham dan Mujiburrahman 109.

²⁸ Masturi Ilham dan Mujiburrahman, *Memoar Sultan Abdul Hamid II: Benteng Terakhir Khalifah Utsmani dalam Menghadapi Yahudi Fremasson dan Sekuler Liberal*, 111.

²⁹ Ash-Shallabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, 295-297.

³⁰ Masturi Ilham dan Mujiburrahman, *Memoar Sultan Abdul Hamid II: Benteng Terakhir Khalifah Utsmani dalam Menghadapi Yahudi Fremasson dan Sekuler Liberal*, 310.

³¹ Ash-Shallabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, 202.

Jenazah Sultan Abdul Hamid II dimakamkan di dekat masjid agung Sultan Mahmud II di Istanbul, sebuah lokasi yang mencerminkan penghormatan atas dedikasi dan perjuangannya selama masa pemerintahannya.³²

B. Strategi dan Tindakan Sultan Abdul Hamid II untuk Menghadapi Keinginan Yahudi untuk Menetap di Palestina

Konflik Palestina-Israel memiliki akar yang mendalam dalam sejarah kawasan Timur Tengah. Pada abad ke-19, wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan Kesultanan Turki Utsmaniyah. Saat itu, Palestina adalah wilayah multietnis dan multiagama, dihuni oleh mayoritas Muslim, serta komunitas Yahudi dan Kristen yang hidup berdampingan.

Namun, dengan munculnya gerakan nasionalisme di Eropa, termasuk Zionisme yang didirikan oleh Theodor Herzl pada akhir abad ke-19, ide tentang pendirian negara Yahudi di Palestina mulai berkembang. Zionisme mendapatkan dorongan besar akibat meningkatnya antisemitisme di Eropa, yang memicu gelombang imigrasi Yahudi ke Palestina. Tujuan utama gerakan ini adalah mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina, yang dianggap sebagai tanah suci mereka berdasarkan keyakinan agama dan sejarah.

Pada tahun 1896, Herzl mempublikasikan bukunya, "Der Judenstaat" (Negara Yahudi), yang menguraikan visi untuk membangun negara Yahudi.³³ Pada tahun berikutnya, Herzl bertemu dengan Sultan Abdul Hamid II untuk menawarkan bantuan keuangan yang signifikan kepada Kesultanan Turki Utsmaniyah, yang saat itu sedang mengalami krisis ekonomi, sebagai imbalan atas izin untuk mendirikan koloni Yahudi di Palestina. Namun, Sultan Abdul Hamid II dengan tegas menolak tawaran ini, menegaskan bahwa Palestina adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah Islam.³⁴

Dalam konteks ini, Al-Qur'an memberikan panduan yang relevan terkait konflik dan perlindungan tempat suci. Allah berfirman dalam Surah Al-Isra (17:1):

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهِ مِنْ عَائِتَّا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"Maha Suci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahui sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."³⁵

Ayat ini menegaskan pentingnya Al-Aqsha sebagai bagian dari wilayah yang diberkahi dan harus dijaga kehormatannya oleh umat Islam.

Pada tahun 1892, Sultan Abdul Hamid II menerima tawaran dari Theodor Herzl, tokoh utama gerakan Zionisme, yang mencoba memanfaatkan kondisi ekonomi

³² I'in Sayyi Mawarti, "Gagasan Pan-Islamisme dan Upaya Sultan Abdul Hamid II Mempertahankan Kekhilafahan Turki Utsmani Tahun 1876–1909." 86.

³³ Theodor Herzl, "Der Judenstaat," 1896, 1.

³⁴ Ali Akyildiz, "The Last Ottoman: Abdulhamid II and the Defense of Islam," 2011.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), 289.

Kesultanan Utsmaniyah yang sedang mengalami kesulitan. Tawaran ini mencakup pembayaran utang luar negeri Kesultanan Utsmaniyah, sejumlah besar uang tunai, serta dukungan politik dari Yahudi Eropa jika Sultan mengizinkan komunitas Yahudi bermigrasi dan mendirikan negara di wilayah Palestina.³⁶

Sultan Abdul Hamid II dengan tegas menolak tawaran tersebut. Beliau berargumen bahwa tanah Palestina adalah milik umat Islam yang telah dijaga selama berabad-abad dengan darah dan pengorbanan. Dalam salah satu suratnya kepada Herzl, Sultan menulis:

"Palestina adalah bagian dari tanah suci umat Islam. Aku tidak akan menyerahkan sejengkal tanah pun darinya, meskipun seluruh dunia menawarkan kekayaan mereka. Tanah ini bukan milikku untuk dijual, melainkan milik umat Islam. Tanggung jawabku adalah menjaganya dengan segenap kekuatan."³⁷

Penolakan ini bukan hanya berdampak pada hubungan Kesultanan Utsmaniyah dengan Zionis, tetapi juga menegaskan posisi Sultan Abdul Hamid II sebagai pemimpin umat Islam yang memprioritaskan kehormatan agama dan integritas wilayah kekhilafahan. Selain itu, Sultan memahami bahwa jika ia mengizinkan migrasi Yahudi ke Palestina, hal ini akan menciptakan konflik besar di kawasan tersebut dan merusak stabilitas sosial.³⁸

Penolakan Sultan Abdul Hamid II juga didasarkan pada pemahamannya tentang bahaya ideologi Zionisme yang mulai berkembang pesat pada akhir abad ke-19. Gerakan ini tidak hanya bertujuan mendirikan negara Yahudi di Palestina tetapi juga mengancam kesatuan umat Islam dan wilayah strategis kekhilafahan. Dalam pandangan Sultan, menerima tawaran tersebut akan menjadi pengkhianatan terhadap amanah umat Islam. Oleh karena itu, ia menginstruksikan agar setiap upaya Zionis untuk membeli tanah di Palestina ditolak mentah-mentah oleh pejabat Kesultanan.³⁹

Di sisi lain, langkah Sultan Abdul Hamid II memicu reaksi dari gerakan Zionisme. Setelah ditolak oleh Kesultanan Utsmaniyah, Theodor Herzl mengalihkan strategi dengan mencari dukungan dari negara-negara Eropa, seperti Inggris dan Prancis, yang pada akhirnya menjadi pendukung utama berdirinya negara Israel di kemudian hari. Keputusan Sultan Abdul Hamid II untuk menolak tawaran ini membuktikan keberanian dan visinya dalam mempertahankan Palestina sebagai bagian integral dari dunia Islam.⁴⁰

Pada tahun 1896, Theodor Herzl, seorang tokoh terkemuka gerakan Zionisme, kembali mencoba mendekati Sultan Abdul Hamid II. Setelah gagal melalui upaya sebelumnya pada tahun 1892, Herzl membawa tawaran baru yang lebih menggiurkan, yaitu pembayaran penuh utang Kesultanan Utsmaniyah kepada pihak asing, serta

³⁶ Masturi Ilham dan Mujiburrahman, *Memoar Sultan Abdul Hamid II: Benteng Terakhir Khalifah Utsmani dalam Menghadapi Yahudi Fremasson dan Sekuler Liberal*, 145-150.

³⁷ Ash-Shallabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, 85-87.

³⁸ Rizka Kusuma Rahmawati, "Studi Historis Kebijakan Luar Negeri Sultan Abdul Hamid II di Daulah 'Utsmaniyah (1876-1909 M)," 43-45.

³⁹ Nik Zaitun Yusni Ali dan Mohd Roslan Mohd Nor, "Ketokohan dan Sumbangan Sultan Abdul Hamid II Sebagai Khalifah Terakhir Dawlah Uthmaniyyah Berlandaskan Prinsip al-Quran dan al-Sunnah," 92-94.

⁴⁰ I'in Sayyi Mawarti, "Gagasan Pan-Islamisme dan Upaya Sultan Abdul Hamid II Mempertahankan Kekhilafahan Turki Utsmani Tahun 1876-1909," 57-58.

investasi besar-besaran di sektor ekonomi jika Sultan bersedia memberikan izin kepada Yahudi Eropa untuk bermigrasi dan mendirikan negara di Palestina.⁴¹

Theodor Herzl bahkan secara langsung berusaha untuk bertemu Sultan Abdul Hamid II melalui perantaraan pejabat tinggi Kesultanan, termasuk Kepala Kantor Urusan Luar Negeri dan beberapa tokoh terkemuka yang memiliki kedekatan dengan istana. Namun, Sultan Abdul Hamid II dengan tegas menolak permintaan Herzl tanpa mempertimbangkan tawaran tersebut lebih lanjut. Sultan menyatakan bahwa Palestina adalah tanah suci umat Islam yang tidak boleh dijual atau diberikan kepada siapapun.⁴²

Sultan Abdul Hamid II, yang memerintah Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1876–1909, dikenal sebagai tokoh yang menghidupkan kembali semangat Pan-Islamisme sebagai strategi politik dan ideologinya. Pan-Islamisme, yang bertujuan menyatukan umat Islam di bawah satu kepemimpinan, menjadi instrumen utama Sultan Abdul Hamid II dalam mempertahankan kekuasaan kekhilafahan di tengah tekanan internal dan eksternal.⁴³

Salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid II adalah memanfaatkan posisinya sebagai Khalifah umat Islam untuk membangun solidaritas umat Muslim di dunia. Melalui retorika Pan-Islamisme, Sultan Abdul Hamid II berusaha menguatkan hubungan dengan komunitas Muslim di luar wilayah Utsmaniyah, termasuk di India, Asia Tenggara, dan Afrika. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menjaga kesatuan umat, tetapi juga sebagai strategi untuk menghadapi ancaman dari negara-negara kolonial Barat seperti Inggris, Prancis, dan Rusia.⁴⁴

Sebagai bagian dari kebijakan Pan-Islamisme, Sultan Abdul Hamid II mengembangkan jaringan komunikasi yang lebih luas antara Kesultanan Utsmaniyah dan dunia Muslim melalui berbagai media, termasuk koran, buku, dan propaganda. Ia juga mendirikan sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan Islam yang menekankan pentingnya persatuan umat Islam.⁴⁵

Sultan Abdul Hamid II (1876–1909) dikenal sebagai sosok pemimpin yang menggabungkan strategi politik dan diplomatik untuk mempertahankan keberlangsungan Kesultanan Utsmaniyah. Di tengah ancaman dari kekuatan kolonial Barat, gerakan separatis, dan tekanan internal dari kelompok reformis dan sekuler, Sultan Abdul Hamid II mengadopsi pendekatan yang cermat dan terencana untuk menjaga stabilitas politik dan integritas teritorial Kesultanan.⁴⁶

Strategi politik Sultan Abdul Hamid II di antaranya adalah sentralisasi kekuasaan yang mana Sultan Abdul Hamid II menerapkan kebijakan sentralisasi untuk memperkuat kontrol terhadap wilayah-wilayah di bawah Kesultanan Utsmaniyah. Beliau mengurangi

⁴¹ Ash-Shallabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, 150-155.

⁴² Ash-Shallabi, 88-90.

⁴³ I'in Sayyi Mawarti, "Gagasan Pan-Islamisme dan Upaya Sultan Abdul Hamid II Mempertahankan Kekhilafahan Turki Utsmani Tahun 1876–1909." 25-28.

⁴⁴ Afifah Alawiyah, "Strategi Kebijakan Politik Pan-Islamisme Turki Utsmani Pada Masa Sultan Abdul Hamid II (1876–1909 M)." 30-33.

⁴⁵ Masturi Ilham dan Mujiburrahman, *Memoar Sultan Abdul Hamid II: Benteng Terakhir Khalifah Utsmani dalam Menghadapi Yahudi Fremasson dan Sekuler Liberal*, 175-178.

⁴⁶ Afifah Alawiyah, "Strategi Kebijakan Politik Pan-Islamisme Turki Utsmani Pada Masa Sultan Abdul Hamid II (1876–1909 M)." 32-34.

otonomi daerah dan meningkatkan peran pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan.⁴⁷ Selain itu, Sultan Abdul Hamid II juga memanfaatkan Ideologi Pan-Islamisme di mana Pan-Islamisme menjadi alat politik utama Sultan Abdul Hamid II dalam menghadapi ancaman kolonialisme. Dengan menyerukan persatuan umat Islam, Sultan Abdul Hamid II berhasil memperoleh dukungan moral dari komunitas Muslim global.⁴⁸ Terjadi pula modernisasi militer dan Infrastruktur yang tercermin pada kesultanan Utsmaniyah di bawah Sultan Abdul Hamid II melakukan modernisasi militer dan infrastruktur, seperti pembangunan jalur kereta api Hijaz, yang tidak hanya memperkuat kontrol administratif tetapi juga meningkatkan koneksi antara wilayah-wilayah Muslim.⁴⁹ Upaya lain adalah dengan menekan gerakan separatis yang mana Sultan Abdul Hamid II dengan tegas menangani gerakan separatis yang mengancam integritas Kesultanan. Beliau menggunakan kombinasi pendekatan militer dan diplomatik untuk mengatasi ancaman tersebut.⁵⁰

Bukan hanya itu saja terdapat pula strategi Sultan Abdul Hamid II tercermin dalam bentuk menjaga hubungan dengan kekuatan besar yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid II menjalankan diplomasi cerdas dengan menjaga hubungan baik dengan negara-negara besar, terutama Inggris, Jerman, dan Rusia. Strategi ini dilakukan untuk mencegah intervensi langsung ke wilayah Kesultanan.⁵¹ Sultan Abdul Hamid II juga membangun hubungan erat dengan Jerman, yang pada saat itu dipandang sebagai sekutu potensial melawan kekuatan kolonial lainnya. Kerja sama ini melibatkan bantuan militer, teknologi, dan infrastruktur.⁵² Terdapat salah satu langkah diplomatik paling terkenal dari Sultan Abdul Hamid II adalah penolakannya terhadap permintaan pemimpin Zionis, Theodor Herzl, untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina. Sultan Abdul Hamid II menegaskan bahwa tanah Palestina adalah milik umat Islam dan tidak dapat dijual kepada pihak asing.⁵³ Membangun diplomasi propaganda juga digiatkan dalam bentuk Sultan Abdul Hamid II memanfaatkan media dan propaganda untuk memperkuat citra Kesultanan Utsmaniyah di dunia internasional. Beliau juga memanfaatkan ulama dan intelektual untuk menyebarkan pesan-pesan politiknya.⁵⁴

C. Dampak dari Keputusan Sultan Abdul Hamid II dalam Menolak Tawaran Yahudi untuk Menetap di Palestina

Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, Kesultanan Utsmaniyah menghadapi berbagai tantangan besar, baik dari dalam maupun luar negeri. Tantangan-

⁴⁷ Masturi Ilham dan Mujiburrahman, *Memoar Sultan Abdul Hamid II: Benteng Terakhir Khalifah Utsmani dalam Menghadapi Yahudi Fremasson dan Sekuler Liberal*, 143-145.

⁴⁸ I'in Sayyi Mawarti, "Gagasan Pan-Islamisme dan Upaya Sultan Abdul Hamid II Mempertahankan Kekhalifahan Turki Utsmani Tahun 1876–1909." 28-30.

⁴⁹ Rizka Kusuma Rahmawati, "Studi Historis Kebijakan Luar Negeri Sultan Abdul Hamid II di Daulah 'Utsmaniyah (1876–1909 M)." 45-48.

⁵⁰ Ash-Shallabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, 110-113.

⁵¹ Purwati Hanik dan Khairil Mustafa, "Sejarah dan Transformasi Politik Turki: Pergulatan Sekularisme dan Islamisme," *Jurnal Tamaddun* 10, no. 1 (2020): 54–56.

⁵² Nik Zaitun Yusni Ali dan Mohd Roslan Mohd Nor, "Ketokohan dan Sumbangan Sultan Abdul Hamid II Sebagai Khalifah Terakhir Dawlah Uthmaniyyah Berlandaskan Prinsip al-Quran dan al-Sunnah." 94-97.

⁵³ Masturi Ilham dan Mujiburrahman, *Memoar Sultan Abdul Hamid II: Benteng Terakhir Khalifah Utsmani dalam Menghadapi Yahudi Fremasson dan Sekuler Liberal*, 158-160.

⁵⁴ Mukarom, "Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Utsmani 1300-1922 M," *Jurnal Tarbiya* 1, no. 1 (2015): 37–39.

tantangan ini tidak hanya menguji ketahanan militer dan diplomasi Kesultanan, tetapi juga memperlihatkan tekad Sultan dalam menjaga integritas wilayah dan kedaulatan Utsmaniyah di tengah tekanan global. Terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh Sultan Abdul Hamid II. Berikut beberapa tantangannya seperti perang Rusia-Turki tahun 1877-1878 yang melibatkan Kesultanan Utsmaniyah dan Kekaisaran Rusia, yang berujung pada kekalahan Utsmaniyah. Dalam Perjanjian San Stefano (1878), Utsmaniyah kehilangan banyak wilayah di Balkan, yang selanjutnya dikoreksi oleh Perjanjian Berlin. Kekalahan ini menunjukkan lemahnya militer Utsmaniyah pada masa itu dan menandai awal dari penurunan kekuasaan Kesultanan di wilayah Eropa Timur.

Bukan hanya itu saja, terdapat intervensi Eropa dalam Perjanjian Berlin (1878) di mana setelah kekalahan dalam Perang Rusia-Turki, Kesultanan Utsmaniyah dipaksa untuk menerima Perjanjian Berlin, yang disponsori oleh kekuatan-kekuatan Eropa seperti Inggris, Jerman, dan Austria-Hongaria. Perjanjian ini mengurangi pengaruh Utsmaniyah di Balkan dan memperlihatkan bagaimana Eropa memanfaatkan kelemahan Kesultanan untuk memperluas pengaruh mereka. Perjanjian ini juga menandai awal dari intervensi Eropa yang lebih luas dalam urusan internal Kesultanan Utsmaniyah.

Di tengah ancaman zionis terhadap Palestina di mana Sultan Abdul Hamid II menghadapi ancaman signifikan dari gerakan Zionis yang dipimpin oleh Theodor Herzl. Herzl berusaha membujuk Sultan untuk memberikan izin kepada orang-orang Yahudi untuk bermukim di Palestina. Namun, Sultan dengan tegas menolak tawaran ini meskipun ada iming-iming pembayaran utang luar negeri Utsmaniyah. Penolakan ini mencerminkan kebijakan Sultan untuk menjaga integritas wilayah Palestina sebagai bagian dari dunia Islam. Dalam memoirnya, Sultan Abdul Hamid II menyebutkan bahwa tanah Palestina adalah milik umat Islam dan tidak dapat diperjualbelikan. Upaya modernisasi militer guna menghadapi ancaman eksternal, Sultan Abdul Hamid II melakukan reformasi militer besar-besaran. Ia bekerja sama dengan Jerman untuk memodernisasi angkatan bersenjata Utsmaniyah, termasuk pengenalan teknologi militer baru dan pembentukan sekolah-sekolah militer modern. Modernisasi ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan Kesultanan terhadap serangan dari luar.

Keputusan Sultan Abdul Hamid II untuk menolak tawaran Theodor Herzl dan gerakan Zionis agar mendirikan negara Yahudi di Palestina memiliki dampak politik yang signifikan, baik bagi Kesultanan Utsmaniyah maupun dunia Islam pada umumnya. Meskipun berada di bawah tekanan besar, Sultan Abdul Hamid II berhasil mempertahankan stabilitas politik di wilayah tersebut dan menegakkan prinsip-prinsip politik yang mendukung kesatuan umat Islam.

Keputusan Sultan Abdul Hamid II untuk menolak tawaran Zionis menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga stabilitas politik Kesultanan Utsmaniyah. Dengan mempertahankan Palestina sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya, Sultan Abdul Hamid II berhasil menghindari potensi keretakan politik yang dapat disebabkan oleh intervensi asing dan pengaruh Zionisme yang mengancam kedaulatan wilayah tersebut.⁵⁵

⁵⁵ Ash-Shallabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, 224.

Penolakan ini menunjukkan tekad Sultan Abdul Hamid II untuk mempertahankan keutuhan wilayah Kesultanan Utsmaniyah dari ancaman ekspansi asing. Keputusan ini menghalangi upaya kolonialisasi dan mempertahankan Palestina sebagai bagian integral dari wilayah kekhalifahan Utsmaniyah.⁵⁶ Keputusan ini juga memperkuat posisi Sultan Abdul Hamid II sebagai pemimpin yang berani menentang tekanan luar negeri demi menjaga kedaulatan politiknya.

Keputusan Sultan Abdul Hamid II memengaruhi hubungan politik antara Kesultanan Utsmaniyah dan dunia Islam secara keseluruhan. Sultan Abdul Hamid II berhasil membangun citra sebagai pemimpin umat Islam yang mempertahankan tanah suci mereka. Hal ini meningkatkan dukungan dari negara-negara Islam dan membangkitkan rasa solidaritas di kalangan umat Muslim, yang melihat Sultan Abdul Hamid II sebagai simbol perjuangan melawan dominasi kolonial.⁵⁷

Penolakan Sultan Abdul Hamid II menghambat kemajuan gerakan Zionis yang berusaha mencaplok Palestina. Langkah ini memberi waktu bagi dunia Islam untuk memperkuat kesadaran politik tentang ancaman Zionisme. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya perhatian terhadap isu Palestina di kalangan masyarakat internasional, khususnya di kalangan umat Islam.⁵⁸

Keputusan Sultan Abdul Hamid II juga mencerminkan kemampuan politiknya dalam menghadapi tekanan internal, baik dari kalangan elit Utsmaniyah yang ingin melakukan reformasi, maupun dari luar negeri yang menuntut penyerahan Palestina. Meskipun ada tantangan ekonomi dan diplomatik, Sultan Abdul Hamid II tetap berpegang teguh pada prinsip untuk menjaga tanah Palestina sebagai wilayah Utsmaniyah.⁵⁹

Keputusan Sultan Abdul Hamid II untuk menolak tawaran yang diajukan oleh gerakan Zionis agar orang Yahudi dapat menetap di Palestina tidak hanya mempengaruhi aspek politik tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan terhadap masyarakat Palestina dan dunia Islam secara keseluruhan.

Salah satu dampak sosial utama dari keputusan Sultan Abdul Hamid II adalah perlindungan terhadap masyarakat Palestina. Dengan menolak tawaran tersebut, Sultan Abdul Hamid II mencegah potensi perubahan sosial yang dapat merugikan penduduk asli Palestina. Penduduk Palestina yang mayoritas Muslim pada masa itu dapat tetap mempertahankan tradisi dan kehidupan sosial mereka tanpa terjadinya pergeseran sosial akibat kedatangan imigran Yahudi.⁶⁰

Keputusan Sultan Abdul Hamid II memiliki dampak positif dalam memperkuat solidaritas sosial di kalangan umat Islam. Penolakan terhadap Zionisme dan gerakan

⁵⁶ Masturi Ilham dan Mujiburrahman, *Memoar Sultan Abdul Hamid II: Benteng Terakhir Khalifah Utsmani dalam Menghadapi Yahudi Fremasson dan Sekuler Liberal*, 179.

⁵⁷ Rizka Kusuma Rahmawati, "Studi Historis Kebijakan Luar Negeri Sultan Abdul Hamid II di Daulah 'Utsmaniyah (1876–1909 M)." 50-51.

⁵⁸ Rayma Nu. Alia, Siti., Falah dkk, "Studi Historis Mengenai Kebijakan Luar Negeri Yang Diterapkan Oleh Sultan Abdul Hamid II di Dinasti Osmani (1876-1909 M)," *Jurnal Khazanah Multidisiplin* 2, no. 2 (2021): 115.

⁵⁹ I'in Sayyi Mawarti, "Gagasan Pan-Islamisme dan Upaya Sultan Abdul Hamid II Mempertahankan Kekhilafahan Turki Utsmani Tahun 1876–1909." 61.

⁶⁰ Masturi Ilham dan Mujiburrahman, *Memoar Sultan Abdul Hamid II: Benteng Terakhir Khalifah Utsmani dalam Menghadapi Yahudi Fremasson dan Sekuler Liberal*, 162.

Yahudi ini memperkuat rasa kesatuan di kalangan umat Islam, terutama dalam mempertahankan tanah suci mereka. Dengan demikian, keputusan ini memperkuat identitas sosial umat Islam sebagai penjaga dan pelindung Palestina dari ancaman eksternal.⁶¹ Hal ini turut mendorong gerakan Pan-Islamisme, yang menyerukan persatuan seluruh umat Islam dalam melawan dominasi asing, terutama kolonialisme.

Keputusan Sultan Abdul Hamid II juga berperan dalam menjaga keharmonisan sosial antara komunitas Muslim, Kristen, dan Yahudi di Palestina. Walaupun terdapat minoritas Yahudi di Palestina pada masa itu, penolakan terhadap permintaan untuk mendirikan negara Yahudi menghindarkan terjadinya ketegangan sosial yang dapat memperburuk hubungan antar kelompok. Keputusan ini menjaga keseimbangan sosial yang ada pada saat itu dan mencegah perpecahan lebih lanjut di tengah masyarakat Palestina.⁶²

Secara lebih luas, keputusan Sultan Abdul Hamid II memberikan pengaruh besar terhadap gerakan sosial dalam dunia Islam, terutama dalam hal kesadaran politik dan sosial. Dengan menolak tawaran tersebut, Sultan Abdul Hamid II memberikan contoh nyata tentang pentingnya mempertahankan integritas sosial dan politik di tengah ancaman kolonialisme dan Zionisme. Keputusan ini menumbuhkan semangat perlawanan di kalangan umat Islam yang kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk gerakan sosial yang mendukung kemerdekaan dan persatuan umat.⁶³

Dalam konteks sosial, penolakan terhadap Zionisme juga berdampak pada peran perempuan dalam masyarakat Palestina dan dunia Islam. Keberhasilan Sultan Abdul Hamid II mempertahankan Palestina memberikan rasa aman bagi perempuan di wilayah tersebut untuk melanjutkan peran serta mereka dalam kehidupan sosial dan keagamaan tanpa adanya tekanan dari pihak eksternal. Hal ini turut mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam masyarakat Muslim.⁶⁴

Keputusan Sultan Abdul Hamid II untuk menolak tawaran dari gerakan Zionis agar orang Yahudi dapat menetap di Palestina tidak hanya memiliki dampak sosial dan politik pada masa itu, tetapi juga menimbulkan dampak jangka panjang yang mempengaruhi dinamika politik dan sosial di wilayah tersebut serta dunia Islam secara keseluruhan.

Salah satu dampak jangka panjang yang paling signifikan adalah keputusan Sultan Abdul Hamid II yang menunda dan menghalangi proses pemukiman Yahudi di Palestina. Meskipun pada awalnya keputusan ini berhasil menjaga stabilitas di Palestina, dampak jangka panjangnya adalah perlawanan berkelanjutan terhadap gerakan Zionisme yang kemudian berujung pada pembentukan Negara Israel pada tahun 1948. Meski Sultan Abdul Hamid II berhasil menangguhkan rencana Zionis pada masa pemerintahannya,

⁶¹ Rizka Kusuma Rahmawati, "Studi Historis Kebijakan Luar Negeri Sultan Abdul Hamid II di Daulah 'Utsmaniyah (1876–1909 M)." 53.

⁶² Ash-Shallabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, 211.

⁶³ I'in Sayyi Mawarti, "Gagasan Pan-Islamisme dan Upaya Sultan Abdul Hamid II Mempertahankan Kekhilafahan Turki Utsmani Tahun 1876–1909." 66.

⁶⁴ Alia, Siti., Falah, "Studi Historis Mengenai Kebijakan Luar Negeri Yang Diterapkan Oleh Sultan Abdul Hamid II di Dinasti Osmani (1876–1909 M)." 116.

gerakan Zionisme tetap berkembang dan mendapat dukungan internasional yang akhirnya mengubah peta politik di Timur Tengah.⁶⁵

Keputusan Sultan Abdul Hamid II mempengaruhi geopolitik dunia Islam pada abad ke-20, terutama dalam kaitannya dengan gerakan Pan-Islamisme yang didorong oleh beliau. Dalam jangka panjang, keputusan Sultan Abdul Hamid II memperkuat rasa solidaritas antara negara-negara Muslim, yang menumbuhkan semangat persatuan dalam menghadapi ancaman eksternal, termasuk Zionisme dan kolonialisme Barat. Walaupun Khilafah Utsmaniyah akhirnya runtuh pada tahun 1924, semangat persatuan umat Islam yang dipupuk oleh Sultan Abdul Hamid II tetap memengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara Islam di masa depan.⁶⁶

Keputusan Sultan Abdul Hamid II untuk menangguhkan imigrasi Yahudi ke Palestina mempengaruhi stabilitas wilayah dalam jangka panjang. Selama periode Sultan Abdul Hamid II, Palestina tetap menjadi bagian integral dari Kekhalifahan Utsmaniyah, dan meskipun ada tekanan dari pihak Barat dan Zionis, wilayah tersebut tidak mengalami perubahan besar dalam komposisi sosialnya. Namun, setelah runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah, ketegangan antara Yahudi dan Arab Palestina semakin meningkat, yang pada akhirnya memunculkan konflik yang berlanjut hingga pembentukan negara Israel dan perang Arab-Israel.⁶⁷

Keputusan Sultan Abdul Hamid II juga berdampak pada hubungan internasional, terutama dengan negara-negara Barat. Keputusan tersebut mencerminkan sikap anti-Zionisme dan menegaskan penolakan terhadap pengaruh asing di wilayah Palestina. Namun, keputusan ini memicu ketegangan dengan negara-negara Barat, terutama Inggris dan Prancis, yang memiliki kepentingan di Timur Tengah. Dalam jangka panjang, hal ini memperburuk hubungan Utsmaniyah dengan kekuatan-kekuatan besar dan mempercepat keruntuhan Kekhalafahan Utsmaniyah pada Perang Dunia I.⁶⁸

Secara internal, keputusan Sultan Abdul Hamid II memiliki dampak jangka panjang terhadap pemikiran Islam, khususnya dalam hal politik Islam dan kesadaran akan ancaman eksternal. Keputusan ini mendorong munculnya berbagai pemikiran yang menekankan pentingnya mempertahankan tanah suci umat Islam dari ancaman luar. Gerakan Pan-Islamisme yang dipelopori oleh Sultan Abdul Hamid II berpengaruh terhadap pemikiran dan kebijakan politik di negara-negara Islam pada abad ke-20, meskipun dengan berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara-negara tersebut di era modern.⁶⁹

KESIMPULAN

⁶⁵ Ash-Shallabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, 248.

⁶⁶ I'in Sayyi Mawarti, "Gagasan Pan-Islamisme dan Upaya Sultan Abdul Hamid II Mempertahankan Kekhalifahan Turki Utsmani Tahun 1876–1909." 74.

⁶⁷ Masturi Ilham dan Mujiburrahman, *Memoar Sultan Abdul Hamid II: Benteng Terakhir Khalifah Utsmani dalam Menghadapi Yahudi Fremasson dan Sekuler Liberal*, 165.

⁶⁸ Rizka Kusuma Rahmawati, "Studi Historis Kebijakan Luar Negeri Sultan Abdul Hamid II di Daulah 'Utsmaniyah (1876–1909 M)." 61.

⁶⁹ Purwati Hanik dan Khairil Mustafa, "Sejarah dan Transformasi Politik Turki: Pergulatan Sekularisme dan Islamisme." 113.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Sultan Abdul Hamid II dalam menghadapi gerakan Zionisme untuk menetap di Palestina didasarkan pada kombinasi antara pertimbangan politik, religius, dan geopolitik. Sultan memandang Palestina sebagai bagian integral dari identitas umat Islam dan simbol legitimasi kekhalifahan Utsmaniyah, sehingga tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan negara. Melalui kebijakan *Pan-Islamisme*, pembatasan imigrasi Yahudi, larangan penjualan tanah kepada pihak asing, penguatan administrasi, pembangunan infrastruktur strategis, dan diplomasi dengan kekuatan besar Eropa, Sultan berupaya mempertahankan integritas wilayahnya dari ancaman eksternal.

Sikap konsisten Sultan dalam menolak tawaran Theodor Herzl pada tahun 1892 dan 1896 menjadi manifestasi dari prinsip bahwa tanah suci adalah amanah umat, bukan komoditas politik atau ekonomi. Kebijakan ini berhasil menunda realisasi proyek Zionis selama masa pemerintahannya dan membangkitkan kesadaran politik umat Islam akan pentingnya mempertahankan Palestina. Walaupun upaya tersebut tidak mampu menghentikan proses migrasi Yahudi pasca runtuhnya Utsmaniyah, warisan ideologisnya tetap menjadi inspirasi bagi perjuangan pembebasan Palestina hingga era modern.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa strategi Sultan Abdul Hamid II, meskipun tidak mengubah arah sejarah secara permanen, memberikan pelajaran penting mengenai keteguhan prinsip dalam politik internasional. Dalam konteks kontemporer, kebijakan beliau menjadi contoh bahwa diplomasi, kekuatan ideologis, dan manajemen geopolitik dapat berjalan beriringan dalam mempertahankan kedaulatan dan identitas bangsa. Ke depan, penelitian serupa dapat memperdalam kajian terhadap hubungan antara kebijakan politik Utsmaniyah dengan dinamika dunia Islam secara global, khususnya dalam menghadapi isu-isu strategis yang menyangkut legitimasi agama dan kedaulatan wilayah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Jangkung Pati atas dukungan akademik dan fasilitas penelitian yang diberikan selama proses penyusunan karya ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Muhamad Yusrul Hana sebagai dosen pembimbing dan rekan sejawat yang telah memberikan masukan konstruktif dalam proses penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Alawiyah. "Strategi Kebijakan Politik Pan-Islamisme Turki Utsmani Pada Masa Sultan Abdul Hamid II (1876–1909 M)." UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Ali Akyildiz. "The Last Ottoman: Abdulhamid II and the Defense of Islam," 2011.
- Alia, Siti., Falah, Rayma Nu. dkk. "Studi Historis Mengenai Kebijakan Luar Negeri Yang Diterapkan Oleh Sultan Abdul Hamid II di Dinasti Osmani (1876-1909 M)." *Jurnal Khazanah Multidisiplin* 2, no. 2 (2021): 115.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*. Jakarta: Pustaka

- Al-Kautsar, 2003.
- David Kushner. "The Ottoman Governors of Palestine, 1864–1914." *Middle Eastern Studies* 23, no. 3 (2006): 279.
- Dedi Supriyadi. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- I'in Sayyi Mawarti. "Gagasan Pan-Islamisme dan Upaya Sultan Abdul Hamid II Mempertahankan Kekhilafahan Turki Utsmani Tahun 1876–1909." UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jembe, 2023.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 2018.
- Masturi Ilham dan Mujiburrahman. *Memoar Sultan Abdul Hamid II: Benteng Terakhir Khalifah Utsmani dalam Menghadapi Yahudi Fremasson dan Sekuler Liberal*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Mukarom. "Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Utsmani 1300-1922 M." *Jurnal Tarbiya* 1, no. 1 (2015): 37–39.
- Murat Gökmen. "Attitudes of Palestinian Arabs Towards Jewish Zionism During and After the Reign of Sultan Abdul Hamid II." *Journal of Islamic Jerusalem Studies* 23, no. 2 (2023): 201.
- Nik Zaitun Yusni Ali dan Mohd Roslan Mohd Nor. "Ketokohan dan Sumbangan Sultan Abdul Hamid II Sebagai Khalifah Terakhir Dawlah Uthmaniyyah Berlandaskan Prinsip al-Quran dan al-Sunnah." *Journal of Ma'alim al-Quran wa al-Sunnah* 14, no. 1 (2018): 93.
- Purwati Hanik dan Khairil Mustafa. "Sejarah dan Transformasi Politik Turki: Pergulatan Sekularisme dan Islamisme." *Jurnal Tamaddun* 10, no. 1 (2020): 54–56.
- Rizka Kusuma Rahmawati. "Studi Historis Kebijakan Luar Negeri Sultan Abdul Hamid II di Daulah 'Utsmaniyah (1876–1909 M)." *JUSPI* 1, no. 1 (2017): 14.
- Saul Bernard Cohen. *Geopolitics: The Geography of International Relations*. Lanham: Rowman & Littlefield, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Theodor Herzl. "Der Judenstaat," 1896.